

Buletin

Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

24

**KAMI SANGAT MENDUKUNG
TINDAKAN HUKUM
YANG TEGAS**

30

**UPDATE JENIS KOMODITI
PERDAGANGAN BERJANGKA**



**ASET KRIPTO:
KOMODITI BUKAN
ALAT PEMBAYARAN**

EDISI 204

FEBRUARI 2019



Persebaran Pasar Lelang Komoditas



 **11 PL**
Daerah diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi perdagangan

 **3 PL**
Daerah sudah melakukan revitalisasi

 **7 PL**
Swasta Murni

***Keterangan**

MKG: PT Meukat Komoditi Gayo
IPASAR: PT Ipasar Indonesia
ACM: PT Asia Commodity Marketplace
POSINDO: PT Pos Indonesia

PKJ: PT Pasar Komoditas Jakarta
BKI: PT Bahtera Komoditi Indonesia
APCM: Asia Pacific Commodity market





Dari Redaksi

Pembaca **Buletin Bappebti** yang budiman,

Pemerintah terus mencermati perkembangan yang terjadi di masyarakat, termasuk bisnis kripto yang beberapa tahun terakhir mulai populer di Indonesia. Kripto menjanjikan keuntungan yang tinggi, tetapi juga menyimpan risiko yang besar atau sering kita menyebutnya dengan istilah *high yield high risk*. Kementerian Perdagangan mengkategorikan bisnis kripto di Indonesia sebagai aset kripto yang diperdagangkan melalui bursa berjangka komoditi.

Masalah kripto yang menarik ini kami angkat sebagai tema utama **Buletin Bappebti** edisi Februari 2019. Sementara pada rubrik Wawancara kami menampilkan Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (PT KBI), Fajar Wibhiyadi, yang menjelaskan peran dan posisi PT KBI dalam transaksi perdagangan berjangka.

Pada terbitan kali ini pembaca juga bisa menyimak peraturan baru tentang Gula Kristal Rafinasi (GKR), pertemuan tingkat menteri Dewan Karet Tripartit Internasional (ITRC-*International Tripartite Rubber Council*) di Bangkok, serta beberapa artikel dalam versi bahasa Inggris. Tak lupa kami juga menampilkan foto-foto kegiatan Bappebti dan Kementerian Perdagangan. Jangan lupa simak juga analisis yang ditulis oleh pelaku perdagangan berjangka sehingga Pembaca bisa memperoleh gambaran perkembangan bidang ini.


Kepada Pembaca yang ingin memberi masukan kepada Redaksi **Buletin Bappebti** silakan hubungi kami melalui email: humas.bappebti@kemendag.go.id atau kontak langsung 0811-1109-901, (021) 31924744, (021) 31923204.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Indrasari Wisnu Wardhana, **Redaktur:** Nusa Eka, **Penyunting / Editor:** Sentot Kamaruddin, Muhammad Rivai Abbas, Apriliyanto, **Fotografer:** Mutia Endang Novianti, Hendra Gunawan, **Sekretaris:** Yudi Ahmad Wahyudi, **Alamat Redaksi:** Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

 Bappebti Kementerian Perdagangan

 @InfoBappebti

 @Bappebti

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id

DAFTAR ISI



PASAR BERJANGKA	10
PASAR LELANG	12
AGENDA FOTO	14
AKTUALITA	18
ENGLISH CORNER	22
INFO HARGA	28
ANALISIS	29

Aset Kripto: Komoditi Bukan Alat Pembayaran

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengizinkan aset kripto menjadi salah satu bentuk komoditi yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Diharapkan dengan kebijakan ini perdagangan aset kripto akan berkembang dan memberi kontribusi yang positif terhadap perdagangan berjangka di Indonesia

Masyarakat Indonesia khususnya mereka yang bergiat di bisnis perdagangan berjangka menyambut positif dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai aset kripto. Menteri Perdagangan pada tanggal 2 Oktober 2018 sudah mengeluarkan keputusan tentang aset kripto semacam *Bitcoin* atau *Ethereum* bisa ditransaksikan di lantai bursa berjangka, yakni Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan BKDI (Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia).

Menyusul keputusan Menteri Perdagangan, pada awal tahun 2019 tepatnya tanggal 8 Februari 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti tentang aset kripto dimana penjelasan mengenai komoditi baru ini diatur lebih rinci.

“*Crypto Asset* yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain,” begitu penjelasan awal Kepala Bappebti, **Indrasari Wisnu Wardhana**.

Peraturan Kepala Bappebti tersebut dikeluarkan karena ada beberapa alasan, antara lain:

- Di Indonesia telah berkembang perusahaan *exchanger* yang memperdagangkan aset kripto dan mentransaksikannya, karena itu maka peraturan ini dikeluarkan agar dapat diatur, diawasi, dan tidak liar.
- Supaya tidak terjadi *capital outflow*, pengaturan ini dibuat agar investor Aset Kripto di Indonesia tidak melakukan transaksi kripto di luar negeri.
- Nilai aset kripto sangat fluktuatif.
- Belum ada pengaturan mengenai penyelenggaraan aset kripto.
- Tidak terdapat pihak yang menangani keluhan masyarakat konsumen aset kripto.
- Identitas pelaku tersamarkan atau tidak dapat diidentifikasi dengan transaksinya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Alasan-alasan tersebut sangat jelas agar bisnis ini dikelola secara baik dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pergerakan ekonomi, khususnya dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Aset kripto sendiri dikategorikan sebagai komoditi *intangible* dan dapat dikategorikan sebagai hak dan kepentingan lainnya.

Sementara itu Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, **M. Syist**, menjelaskan aset kripto dapat dikategorikan sebagai Komoditi sesuai UUPBK Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011 (“UUPBK”) yang menyatakan bahwa:



“*Crypto Asset yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital asset.*”

—INDRASARI WISNU WARDHANA

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.”

Bappebti menilai peluang bisnis aset kripto sangat bagus bagi perkembangan Perdagangan Berjangka Komoditi. Karena itulah dinilai sangat penting mengeluarkan peraturan yang memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang ini. “Dengan diterbitkannya peraturan Bappebti diharapkan akan lebih mudah mengawasi transaksinya, dapat mendorong naiknya pengguna aset kripto, serta dapat menjadi stimulus yang optimal untuk menghidupkan pasar aset kripto. Peraturan Bappebti ini juga untuk mencegah *capital outflow* ke luar negeri, memberikan manfaat ekonomi, serta dapat memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto,” kata M. Syist.



Foto: Biro Humas

Perkembangan Bisnis Kripto

Sejak munculnya tawaran bisnis kripto, produk investasi ini banyak menyedot perhatian masyarakat. Di Indonesia yang paling populer sehingga menjadi bahan pembahasan banyak kalangan adalah *Bitcoin*. **Oscar Darmawan** yang merupakan *founder Bitcoin.co.id* sebagaimana dilansir oleh *cryptouniversitu.co.id* memberi gambaran dimana *Bitcoin* mengalami peningkatan popularitas yang cukup signifikan di Indonesia. Banyak kalangan yang mendiskusikan masalah ini, walaupun sebagian besar juga belum memiliki informasi yang cukup mengenai *Bitcoin*. Yang diperbincangkan adalah bahwa investasi ini berbeda dengan emas, atau komoditi lainnya. *Bitcoin* adalah transaksi digital. Begitulah masyarakat awam mengetahuinya.

Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin semakin populer. Dalam sebuah konferensi yang diadakan oleh *Blackarrow Conferences* yaitu konferensi Block Bali 2017, **Jorg Molt** yang merupakan CEO *Satoshi School* juga memprediksi bahwa *Bitcoin* akan mengalami kepopuleran yang terus meningkat sampai sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan. Menurut PT Bitcoin Indonesia, jumlah pengguna *Bitcoin* di Indonesia telah mencapai kurang lebih 290 ribu pengguna dimana 50 persen di antara mereka merupakan pengguna yang aktif per harinya.



“Dengan diterbitkannya peraturan Bappebti diharapkan akan lebih mudah mengawasi transaksi dan mendorong naiknya pengguna aset kripto.”

—M. SYIST



Saat ini di Indonesia kebanyakan pengguna *cryptocurrency* memanfaatkan koin mereka untuk keperluan investasi, dan juga remitansi, yaitu melakukan proses transfer ke negara yang berbeda.

Adalah hal yang menarik jika melihat profil para pengguna *Bitcoin* di Indonesia rata-rata bukan dari kalangan menengah ke atas. Ini disebabkan kalangan menengah ke atas masih dinilai cukup konservatif dalam penerimaan sebuah teknologi baru. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di luar Indonesia, dimana kebanyakan pengguna *cryptocurrency* justru merupakan kalangan menengah ke atas dengan kondisi finansial yang menjanjikan.

Gambaran seperti itu memberi *warning* kepada pemerintah untuk lebih sigap mengatur bisnis ini, karena sifat bisnis ini yang sangat fluktuatif dan membutuhkan kepiawaian untuk menjalankannya.

M Syist menjelaskan hampir seluruh negara di dunia telah menjalankan transaksi *cryptocurrency*. Tetapi pada beberapa negara kepastian hukum dan pengaturannya masih berada pada *grey area*. Indonesia tentu tidak menginginkan wilayah abu-abu bisa merugikan masyarakat di kemudian hari. Karena itu area yang remang-remang itu mesti segera diperjelas. Beberapa negara sudah memastikan posisi kripto di negara mereka masing-masing. Kripto di Jepang misalnya dikategorikan sebagai uang, Malaysia sebagai saham, Filipina sebagai jasa *remittance*. Sementara Thailand dan Indonesia mengkategorikan kripto sebagai aset.

Mengapa transaksi kripto menarik, hal ini disebabkan bisnis kripto menjanjikan keuntungan yang berlipat. Namun demikian di balik janji itu, transaksi kripto juga mengandung risiko yang besar. Dalam transaksi kripto, contohnya *Bitcoin*, dikatakan bahwa nilai *Bitcoin* sepenuhnya tergantung pada kemauan investor untuk bersedia membayar pada suatu titik waktu tertentu.

Berikut ini penegasan Bappebti yang diberi amanat menjalankan tugas dan fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan bagi pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), bahwa:

- Aset kripto adalah komoditi dan bukan sebagai alat pembayaran
- Sejauh ini Indonesia belum merencanakan untuk mengeluarkan produk aset kripto
- Transaksi aset kripto yang saat ini diperdagangkan di Indonesia masih mengacu pada token/*coin existing* yang banyak ditransaksikan oleh exchanger seluruh dunia dan ter-listed dalam *coin market cap*.
- Agar transaksi aset kripto dapat berjalan secara wajar dan transparan Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait yang mendukung perkembangan aset kripto di Indonesia



Foto: Biro Humas

Jika kita mencari informasi tentang apa itu mata uang kripto melalui *Google.com* maka diterangkan mata uang kripto (*cryptocurrency*) adalah alat pembayaran digital yang aman dari tindakan pemalsuan, penyalinan maupun pengubahan. Setiap koin virtual ini memiliki nomor spesial, dengan transaksi mata uang kripto dilakukan secara anonim dengan menggunakan kunci khusus. Transaksi yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan.

Jadi ada risiko-risiko yang harus secara matang dipertimbangkan dalam bisnis ini. M Syist menambahkan dengan semakin tingginya minat masyarakat dalam berinvestasi pada aset kripto, maka risiko yang kemungkinan dihadapi pelaku bisnis ini adalah dompet digital mereka juga semakin rentan dicuri.

Pasal 15

- (1) Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.
- (2) Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyimpan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari total Aset Kripto yang dikelolanya, secara *offline* atau *cold storage*.
- (3) Penyimpanan secara *offline* atau *cold storage* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. bekerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dalam rangka penggunaan jasa penyimpanan *token* atau *wallet*;
 - atau
 - b. memiliki sendiri sistem atau mekanisme penyimpanan *token* atau *wallet*.
- (4) Sisa Aset Kripto yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto dengan mempertimbangkan manajemen risiko.



Untuk itulah Bappebti memberi upaya pengamanan kepada masyarakat yang bertransaksi aset kripto, seperti tercantum dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa aset kripto milik pelanggan wajib dijaga keamanannya oleh pedagang fisik aset kripto (Pasal 15 ayat 1) dan pedagang fisik aset kripto wajib menyimpan paling sedikit 70% dari total aset kripto yang dikelolanya secara *offline* atau di *cold storage* (Pasal 15 ayat 2).

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan dan Peraturan Kepala Bappebti telah memberikan dampak positif pada bisnis ini, antara lain:

- Memberikan kepastian hukum perdagangan aset kripto di Indonesia.
- Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal.
- Dalam rangka perlindungan konsumen.
- Menarik investasi asing (devisa) masuk ke Indonesia.

Selain itu dalam rangka pengawasan transaksi kripto maka pemerintah mewajibkan kepada *Exchanger* (Pedagang Aset Kripto) untuk memenuhi kewajiban, antara lain:

- Pelaporan transaksi kripto (bagi pelaku usaha aset kripto);
- Menerapkan *Know Your Customer* (KYC);
- Menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
- Kewajiban permodalan bagi pelaku usaha aset kripto;
- Penentuan sertifikasi berstandart internasional bagi keamanan sistem perdagangan aset kripto;
- Pihak yang menyelenggarakan kegiatan transaksi aset kripto harus memperoleh ijin dan/atau persetujuan dari Kepala Bappebti dan melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan.

Untuk pengamanan perdagangan berjangka komoditi (PBK) telah diberlakukan peraturan Kepala Bappebti yang terkait dengan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang tertera dalam:

- Peraturan Kepala Bappebti No. 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka;
- Peraturan Kepala Bappebti No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kepatuhan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pialang Berjangka;
- Peraturan Kepala Bappebti No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai Oleh Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- Peraturan Kepala Bappebti No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pialang Berjangka.

Bappebti berharap dengan dikeluarkannya peraturan mengenai aset kripto, transaksi yang tergolong dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) ini dapat tumbuh dalam iklim bisnis yang sehat, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan bisnis di Indonesia secara keseluruhan.

Urgensi Pembentukan Pasar Fisik Karet Regional

Per pertemuan tingkat menteri Dewan Karet Tripartit Internasional (*International Tripartite Rubber Council/ITRC*) di Bangkok, Thailand, 21-22 Februari 2019 menghasilkan sejumlah keputusan untuk mengatasi kecenderungan makin turunnya harga karet dunia dalam beberapa tahun terakhir. Seperti disampaikan dalam siaran pers Kemenko Perekonomian (25/2) dan dilansir sejumlah media, Menteri Koordinator Perekonomian **Darmin Nasution** di Jakarta, menjelaskan keputusan tersebut merekomendasikan negara-negara yang tergabung dalam ITRC menjalankan tiga kebijakan berupa pengaturan jumlah ekspor, peningkatan konsumsi di dalam negeri, dan peremajaan tanaman (*replanting*) karet alam.

Ketiga kebijakan tersebut diyakini akan mendorong naiknya harga karet alam dunia ke tingkat yang lebih baik. Perlu diketahui bahwa ketiga anggota ITRC yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia adalah negara-negara penghasil karet alam yang menguasai sekitar 66 persen produksi karet dunia. Sehingga langkah-langkah yang diambil ketiga negara dalam kerangka ITRC tersebut akan mempengaruhi pergerakan harga karet dunia. Saat ini harga karet alam ekspor sekitar 1,45 dolar AS per kilogram dan di tingkat petani hanya Rp 7.000 sampai Rp 7.500 per kilogram. Tingkat harga ini jauh di bawah harga karet alam pada beberapa tahun silam yang sempat mencapai Rp 12 ribu per kilogram di tingkat petani.

Foto: Biro Humas



Ketiga kebijakan tersebut akan dilakukan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Terkait pengaturan jumlah ekspor, ketiga negara sepakat untuk dalam tiga bulan ke depan mengurangi jumlah ekspor sekitar 200-300 ribu ton. Pengurangan ekspor dilaksanakan melalui mekanisme *Agreed Export Tonnage Scheme* (AETS) yang akan dibahas dalam pertemuan pejabat senior kementerian ketiga negara di Bangkok, Thailand, awal Maret 2019. Pengurangan ekspor dinilai merupakan upaya efektif untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan karet di pasar global.

Menyangkut kebijakan untuk meningkatkan penyerapan produksi karet di dalam negeri, pemerintah Thailand menyatakan akan menambah serapan karet 270 ribu ton di luar proyeksi konsumsi domestik yang mencapai 700 ribu ton per tahun. Sedangkan Pemerintah Malaysia akan mengalokasikan anggaran 100 juta ringgit untuk pembangunan dan perawatan jalan di pelabuhan dan kawasan industri dengan bahan baku karet. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan meningkatkan penggunaan karet untuk proyek-proyek infrastruktur berupa pembangunan jalan, bantalan rel kereta, pemisah jalan dan vulkanisir ban.

Adapun berkenaan dengan kebijakan peremajaan tanaman karet, Thailand akan menyediakan 65 ribu hektar lahan per tahun, Indonesia 50 ribu hektar per tahun, dan Malaysia 25 ribu hektar per tahun. Peremajaan perkebunan karet ini dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan pasokan dan permintaan karet di masa depan.

Pasar Karet Regional

Selain tiga kebijakan di atas, pertemuan ITRC di Bangkok, Thailand, juga mengarahkan ketiga negara anggotanya untuk membentuk pasar karet regional (*Regional Rubber Market/ RRM*) dan mendirikan pusat arbitrase sebagai institusi pendukungnya. Di samping itu ketiga negara juga akan mendorong pembentukan Dewan Karet ASEAN (*ASEAN Rubber Council/ARC*) sebagai *platform* untuk membahas perkembangan industri karet dan kerjasama antarnegara ASEAN.

Inisiatif pembentukan pasar karet regional sebenarnya sudah sejak lama dibahas dalam pertemuan tingkat menteri ITRC. Namun, inisiatif tersebut hingga saat ini belum terealisasi karena adanya sejumlah kendala.

Pada pertemuan ITRC tahun 2015 ketiga negara sudah sepakat untuk segera membentuk pasar karet regional. Prosesnya akan diawali dengan penyusunan publikasi harga pasar karet regional oleh tiga negara. Data-data dikumpulkan dan *platform* elektroniknya disiapkan. Sehingga diperkirakan pada pertengahan Juni 2016 seuruh informasi perdagangan karet di tiga negara memiliki *platform* yang sama. Hal itu bertujuan menyamakan standar dan kualitas karet di ketiga negara. *Platform* inilah yang akan menjadi cikal bakal pembentukan pasar berjangka karet (*sindonews.com/3 Desember 2015*). Namun, hingga pertemuan ITRC 2019 pasar fisik karet regional belum juga dapat diwujudkan dan masih terus diupayakan.

Pada tanggal 15 Februari 2019 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diselenggarakan rapat untuk menyiapkan bahan bagi pertemuan tingkat menteri ITRC di Bangkok, Thailand, 21-22 Februari 2019. Pada rapat tersebut disampaikan bahwa pembentukan pasar karet regional (RRM) di Indonesia, Thailand dan Malaysia belum bisa dilaksanakan karena undang-undang di Thailand hanya mengizinkan penggunaan mata uang Bath. Bila RRM dilaksanakan dalam bentuk pasar berjangka, hal itu dinilai tidak akan mempunyai pengaruh signifikan sebagai instrumen untuk meningkatkan harga karet, karena Bursa Berjangka di masing-masing negara tidak bisa mewajibkan pelaku usaha agar bertransaksi di Bursa Berjangka.

Implementasi pasar berjangka karet regional masih akan menghadapi kendala yaitu mutu karet di Indonesia dan masih sedikitnya produsen yang menggunakan kontrak berjangka untuk *hedging*. Untuk itu, terkait kesepakatan tiga negara dalam kerangka ITRC, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) akan melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha guna memperoleh spesifikasi Kontrak Berjangka yang tepat serta menarik penggerak pasar (*market maker*).

Pembentukan pasar karet regional sesungguhnya merupakan masalah mendesak untuk segera diwujudkan, terutama sebagai upaya menstabilkan harga karet yang bisa memberi manfaat bagi para produsen maupun industri serta negara. Adanya berbagai kendala merupakan 'pekerjaan rumah' yang perlu dipikirkan jalan keluarnya.



Gula Rafinasi Dilarang Dijual Eceran

Pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang perdagangan gula rafinasi yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 01 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 11 Januari 2019. Yang dimaksud dengan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi, yang memenuhi SNI yang ditetapkan wajib oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan Pos Tarif/ HS. 1701.99.11.00.

Berdasarkan peraturan baru yang berlaku efektif mulai 21 Januari 2019 tersebut Gula Kristal Rafinasi (GKR) dilarang diperdagangkan di pasar eceran. Produsen GKR juga dilarang menjual GKR kepada distributor, pedagang pengecer, dan/atau konsumen. "GKR hanya dapat diperdagangkan oleh produsen GKR kepada industri pengguna sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi dan dilakukan melalui kontrak kerja sama. Produsen GKR juga bertanggung jawab terhadap gula rafinasi yang diperdagangkan secara langsung kepada industri pengguna," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, **Tjahya Widayanti**.

Untuk memenuhi kebutuhan industri pengguna skala kecil dan menengah maupun usaha kecil menengah (UKM), produsen dapat menjual GKR melalui distributor yang berbadan usaha koperasi. "Nantinya, koperasi penerima GKR wajib menyampaikan laporan distribusi GKR kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag dan koperasi bertanggung jawab terhadap GKR yang didistribusikan kepada anggotanya," kata Tjahya. Di dalam peraturan ini juga disebutkan bagi industri pengguna dilarang memindahtangankan dan/atau menjual GKR yang diperoleh dari produsen GKR dan/atau koperasi.

Selanjutnya perdagangan GKR diatur menggunakan kemasan berukuran paling sedikit 50 kg. Namun, untuk memenuhi kebutuhan khusus industri pengguna, GKR dapat diperdagangkan dengan menggunakan kemasan berukuran 25 kg. "Pada kemasan GKR yang digunakan untuk kedua jenis kebutuhan tersebut wajib dicantumkan label, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan," tambah Tjahya.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan industri pengguna skala besar, gula rafinasi dapat didistribusikan dalam bentuk curah. Bedanya, untuk skala besar harus menggunakan alat angkut yang tertutup, yakni berbentuk tangki dan memenuhi kriteria keamanan pangan. Volume yang bisa diangkut dengan kendaraan khusus itu paling sedikit 25.000 kg. GKR yang didistribusikan selain memuat informasi produk juga wajib dilengkapi dengan Salinan Dokumen Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI). Hal lainnya adalah GKR tersebut harus didistribusikan langsung kepada industri pengguna sesuai kontrak yang telah disepakati.

Permendag ini juga mengatur perdagangan GKR antarpulau untuk kebutuhan industri pengguna. Adapun persyaratannya yaitu produsen GKR wajib melampirkan Surat Persetujuan Perdagangan Antar Pulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR) yang dapat diperoleh dengan mengajukan surat permohonan secara elektronik melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) dengan



Foto: Biro Humas

melampirkan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bukti permintaan dari industri pengguna. Untuk menjual GKR, produsen GKR diwajibkan membuat pernyataan mandiri bahwa telah memenuhi persyaratan perdagangan GKR. Selain itu, produsen GKR juga diwajibkan menyampaikan laporan realisasi perdagangan GKR secara menyeluruh kepada menteri yang disampaikan secara elektronik melalui SIPT. Laporan realisasi perdagangan GKR dilakukan setiap satu bulan sekali, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. "Produsen GKR, koperasi, dan industri pengguna GKR yang melanggar aturan dalam Permendag ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Tjahya. Tjahya juga menyampaikan, Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga akan mengawasi perdagangan GKR baik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Permendag ini, maka Permendag Nomor 74/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Faktor Kunci Implementasi SRG

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyampaikan peran serta Pemerintah Daerah, Perbankan, Koperasi, dan para pelaku usaha sangat penting supaya implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) dapat terlaksana dengan optimal. Dari beberapa kajian terkait implementasi SRG, faktor kunci agar implementasi SRG dapat terwujud adalah komitmen Pemerintah Daerah setempat, terintegrasinya kelembagaan dalam satu tempat, peningkatan edukasi dan sosialisasi, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi pertanian serta tersedianya pasar yang likuid atau tersedianya serapan hasil produk pasar pertanian melalui pasar lelang.

Penegasan ini disampaikan di hadapan 100 peserta dalam acara Literasi Sistem Resi Gudang yang dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/2).

Dalam rangkaian acara tersebut juga dilakukan dialog mengenai “Optimalisasi SRG dalam Meningkatkan Produktivitas Petani” di iNews TV dan Radio MNC Trijaya FM.



Foto: Biro Humas



Bimtek SRG dan PLK



Foto: Biro Humas



Sebanyak 90 orang peserta dari 30 provinsi di seluruh Indonesia mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) mengenai Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK). Bimtek ini diselenggarakan 11-14 Februari 2019 di Solo, Jawa Tengah.

RAT Aspebtindo



Foto: Biro Humas

Asosiasi Pedagang Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2019, Senin (18/2) di Jakarta. Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan satu tahun sekali, untuk melaporkan kegiatan dan rencana kerja. Hadir dalam acara ini Pengurus Aspebtindo dan juga Kepala Bappebti.



Foto: Biro Humas

Rakor Aparat Penegak Hukum PBK

Bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Bappebti melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Aparat Penegak Hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Rakor berlangsung di Padang, Kamis (21/2). Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M. Syist menyampaikan materi mengenai Koordinasi Penanganan Pelanggaran Ketentuan di bidang PBK oleh Pihak Yang Berizin maupun Tidak Berizin.



Foto: Biro Humas

Raker Kemendag dengan DPR

Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (11/2). Agenda utama pembahasan tentang penjelasan Pemerintah terkait Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Indonesia dengan Pakistan, serta penjelasan Pemerintah terkait Pengesahan ASEAN-Hong Kong FTA dan ASEAN-China FTA.





Terus Promosi, Indonesia Hadirkan Kopi di MICE 2019 Australia

Kementerian Perdagangan terus mendorong pengembangan pasar kopi ke Australia. Salah satunya dengan berpartisipasi dalam pameran industri kopi terbesar di Australia, *Melbourne Internasional Coffee Exhibition (MICE)* 2019 yang digelar pada 7-9 Februari 2019 di *Melbourne Convention and Exhibition Center (MCEC)*, Melbourne, Australia.

Keikutsertaan Indonesia tersebut terwujud atas kerja sama *Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)* Sydney dengan Atase Perdagangan Canberra dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne. "ITPC Sydney secara rutin mengikuti kegiatan ini karena kopi masih merupakan salah satu produk unggulan Indonesia yang mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Australia," ujar Kepala ITPC Sydney, Ayu Siti Maryam.

Konsul Jenderal RI Melbourne, Spica Alphanya Tutuhaturnewa beserta tim ekonomi KJRI Melbourne resmi membuka Paviliun Indonesia, dilanjutkan dengan berkeliling berbagai stan untuk melihat produk-produk kopi yang dipamerkan.

Pada kesempatan kali ini, Paviliun Indonesia menampilkan tiga perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha kopi Indonesia, yaitu PT Gayo Bedetak, Q Coffee, dan Opal Coffee. PT Gayo Bedetak menampilkan *green beans* dari beberapa wilayah di Sumatera. Sedangkan Q Coffee dan Opal Coffee, yang merupakan perusahaan Australia yang dimiliki oleh diaspora Indonesia, mengimpor biji kopi Indonesia, di antaranya dari Sumatera, Jawa, Bali, Flores, Sulawesi, dan Papua ke Australia.



Total transaksi potensial selama tiga hari dari tiga perusahaan Indonesia yang ikut serta pada MICE 2019 sebesar USD 341.400, masing-masing Opal Coffee dengan transaksi potensial sebesar USD 185.000, Q Coffee sebesar USD 150.000, dan PT Gayo Bedetak sebesar USD 6.400.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor kopi Indonesia ke Australia pada bulan Januari-September 2018 tercatat sebesar USD8,32 juta.



Perang Dagang dan Suplai Berlebih Tekan Harga Nikel

Berbeda dengan emas dan timah, harga nikel di perdagangan internasional justru melemah. Mengutip *Bloomberg*, harga nikel untuk kontrak tiga bulanan di *London Metal Exchange (LME)*, Kamis (14/2) berada di level USD 12.200 per metrik ton. Ini berarti turun 1,65 % dari hari sebelumnya USD 12.405 per metrik ton. Dalam sepekan terakhir harga nikel merosot 6,04 %.

Peneliti Senior dan Analis *Asia Trade Point Futures*, Cahyo Dewanto mengatakan, harga nikel tergerus karena turunnya produksi kendaraan listrik oleh Cina. "Nikel dipakai sebagai bahan campuran baterai EV untuk kendaraan listrik. Nah, produsen Cina tidak mampu memproduksi kendaraan listrik dalam jumlah besar seiring belum jelasnya hasil perundingan dagang AS-Cina," ujar Cahyo.

Masalah perang dagang AS-Cina yang masih belum menemukan titik temu penyelesaian diperkirakan menjadi penyebab turunnya harga nikel. Selain itu menurut Cahyo, produksi nikel di Kuba dan Kanada naik 4 % dari tahun lalu yaitu pada level 4.294 ton. "Dengan demikian suplai menjadi berlebih, sedangkan permintaan menurun. Hal ini menimbulkan pelemahan harga nikel," tambahnya.



Presiden: Dorong Ekspor Industri Makanan dan Minuman

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan mempersiapkan upaya untuk meningkat aktivitas ekspor Indonesia. Salah satunya adalah memprioritaskan industri makan dan minuman agar mampu meningkatkan ekspor. “Ada prioritas. Tadi saya sampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, industri makanan dan minuman menjadi prioritas karena *growth*-nya tinggi, yaitu 9 persen. Itu gede banget,” kata Presiden di Cikupa, Tangerang, Banten, Senin (18/2).

Jokowi menilai, selama ini industri makanan dan minuman mampu menunjukkan kinerja yang positif serta tumbuh dengan signifikan. Karena itu pemerintah akan mendukung industri ini supaya bisa tumbuh lebih baik dan aktivitas ekspornya meningkat. “Industri ini harus diberikan dukungan. Memang kemarin ada sedikit masalah, misalnya Mayora dan Filipina. Nah, pemerintah mengirimkan tim berbicara dengan pemerintah Filipina agar yang ada tetap bisa masuk,” kata Presiden Jokowi.

Guna mendukung peningkatan ekspor tersebut, pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan supaya menarik banyak investasi yang masuk. Sehingga diharapkan perusahaan yang menanamkan modal di Indonesia bisa mengekspor produknya ke mancanegara. “Saya kira regulasi untuk ekspor hampir dikatakan semuanya disederhanakan. Karena memang kuncinya di situ untuk memperbaiki neraca perdagangan kita, memperbaiki neraca transaksi kita. Yang paling penting kecepatan ekspor harus didorong,” tambahnya.



Emas Masih Menunjukkan Tren Kenaikan

Memasuki pertengahan bulan Februari harga emas kembali lanjutkan penguatannya. Pada perdagangan Senin (18/2) harga emas berada pada level USD 1.328 per ons troy, naik 0,45 % dibandingkan akhir pekan lalu yang berada pada harga USD 1.322 per ons troy. Kenaikan harga logam mulia ini disebabkan karena melemahnya dolar AS terhadap mata uang lainnya.

Selain itu seperti diungkapkan oleh analis PT Rifan Financindo Berjangka, Puja Purbaya Sakti, penguatan emas kali ini merupakan hasil langsung dari sentimen pasar yang didasari pada negosiasi perdagangan antara AS dengan Cina yang dikabarkan mengalami kemajuan dan mendekati resolusi.

Puja Purbaya Sakti merekomendasikan untuk membeli emas selama harganya di atas USD 1.332 per ons troy, dengan level *resistance* antara 1.325,37, 1.329,73, 1.341,23 dan *support* antara 1.313,87, 1.306,73, 1.295,23.



Stabilkan Harga Bapok Dengan Gerai Maritim dan Tol Laut

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan guna menjaga stabilitas dan turunkan disparitas harga barang kebutuhan pokok, Kementerian Perdagangan mengembangkan program Gerai Maritim dengan memanfaatkan tol laut. "Program Gerai Maritim dilaksanakan untuk meningkatkan kelancaran arus dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting," kata Mendag saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Tol Laut yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pers Nasional 2019 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (4/2).

Mendag menjelaskan tujuan program Gerai Maritim adalah untuk mengurangi biaya distribusi barang, meningkatkan perdagangan antar pulau, memperluas jaringan distribusi produk unggulan daerah setempat sebagai muatan balik, serta meningkatkan kesejahteraan

petani dan nelayan di daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan (3TP). "Program kerja ini sejalan dengan program kerja pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk angkutan barang yang dituangkan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan," tambah Mendag.

Peran Kementerian Perdagangan dalam hal tol laut sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2017, antara lain berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan pendataan; pemantauan dan evaluasi jenis, jumlah, dan harga barang dari dan ke daerah yang termasuk dalam program tol laut; serta mengatur jenis barang selain barang kebutuhan pokok dan penting yang dapat diangkat dalam program tol laut. Kementerian Perdagangan juga membangun Depo Gerai Maritim di beberapa daerah yang dilalui trayek tol laut sebagai sarana distribusi pendukung.



Emas PT Aneka Tambang Sedikit Terkoreksi

Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) sedikit turun pada perdagangan Kamis (14/2). Mengutip situs logammulia.com harga emas batangan Antam mencapai Rp 664.000 per gram atau turun Rp 3.000 per gram dari hari sebelumnya yakni Rp 667.000 per gram.

"Rupiah dalam tiga sesi terakhir bergerak *flat* akhirnya harga emas Antam mengikuti," kata Alwi Assegaf, analis Global Kapital Investama. Menurutnya, meski harga emas Antam terkoreksi tetapi sifatnya cenderung datar. Sebab pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga tidak terlalu tajam. Harga emas global terpantau stagnan. Mengutip *Bloomberg*, Kamis (14/2), harga emas global stagnan di level USD 1.306 per ons troy.

Alwi memperkirakan, sampai akhir tahun harga emas Antam masih bisa *bullish* dengan prediksi harga Rp 685.000 per gram.



Efek Dolar, Perdagangan Timah Juga Ikut Terangkat

Harga komoditas timah sedang membaik pada awal tahun 2019 ini. Mengutip *Bloomberg* pada Jumat (15/2) harga timah mencapai USD 21.200 per metrik ton. Angka ini meningkat 1,43 % dibandingkan hari sebelumnya yang berada pada level USD 20.900 per metrik ton. Kondisi harga timah yang juga menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia juga lebih baik dibandingkan dalam periode *year to date* (ytd) yakni tumbuh 8,85 % yang harganya bertengger pada USD 19.475 per metrik ton pada penutupan perdagangan tahun lalu.

Analisis *Asia Trade Points Futures*, Cahyo Dewanto, menilai kenaikan harga timah ini tidak lepas dari kemajuan perundingan dagang Amerika Serikat (AS) dan Cina yang semakin dekat dengan tenggat waktu kesepakatan yakni 1 Maret 2019. Perundingan penyelesaian masalah tarif impor kedua negara tersebut pekan ini kembali digelar di Washington DC, AS. Kondisi ini justru menekan dolar AS dan mendorong harga logam, termasuk timah.



Kemendag Perketat Impor Produk Ban

Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan memperketat dan mencegah impor yang berlebihan untuk produk ban. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 77/MDAG/PER/11/2016 Tentang Ketentuan Impor Ban. Sebelumnya, Permendag No. 77 Tahun 2016 telah mengalami perubahan pertama dengan diterbitkannya Permendag No. 6 Tahun 2018 dan perubahan kedua dengan Permendag No. 117 Tahun 2018.

"Kebijakan ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi importasi produk ban. Dengan adanya kebijakan ini, lalu lintas impor bisa lebih ketat dan terukur melalui pusat logistik berikat (PLB), sehingga bisa mencegah terjadinya lonjakan impor," ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan.

Pada Permendag No. 5 Tahun 2019 ditetapkan bahwa importasi ban oleh perusahaan pemilik nomor induk

berusaha (NIB) yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen (API-P), dapat dilakukan dari negara asal atau melalui pusat logistik berikat (PLB). Sedangkan, pemilik NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum (API-U) hanya dapat mengimpor melalui PLB.

Oke menambahkan ketentuan ini hanya akan berlaku bagi impor ban yang tiba di pelabuhan tujuan setelah 1 Maret 2019 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (B.C 1.1). "Diharapkan, ketentuan ini dapat menekan lonjakan impor ban. Kemendag terus berkomitmen mendorong pembangunan industri, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing produk ban nasional," lanjut Oke.

Selain itu, guna meningkatkan daya saing ban nasional, pemerintah juga meminimalisasi dokumen prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan perpanjangan masa berlaku persetujuan impor, yaitu cukup melampirkan hasil pindai dokumen asli persetujuan impor dan *bill of lading* (B/L).

Government Supports Exports Coffee Processed Products to Russia

Minister of Trade Enggartiasto Lukita said the government strongly supports the export of value-added products such as processed coffee products. So far, Indonesian exports still rely on mining commodities and oil palm. "Therefore, it is our duty to promote more exports of value-added products such as processed coffee products," said the Minister of Trade at the event entitled "Proud as Indonesia, Mayora Successfully Penetrates the Export Market to Russia" in Jakarta, Wednesday (02/06).

As released by kemendag.go.id website (6/2), Minister Enggar revealed that coffee is not only a beverage product but also as a part of a lifestyle that is increasingly consumed. By 2018, world coffee consumption is around 157 million bags, with growth of 2 percent per year and coffee demand will double by 2050. In the United States, Europe and Japan, coffee demand growth is even higher at more than 3 percent

per year. Finland is the country with the most population of coffee drinkers in the world with an average of 12.9 kg per person per year or an average of around 14 cups a day. This is followed by other cold-temperate Nordic countries such as Norway, Iceland and Denmark.

"Coffee is very popular in cold-temperature countries because it does not only help to restore energy, but also provides warmth and comfort," said the Trade Minister.

The Minister of Trade revealed that Indonesia had a deficit in the total trade balance with Russia, which expanded to USD 476.5 million for the January-November 2018 period compared to the same period the previous year. Therefore The Minister Enggar highly appreciates PT Mayora Indah who has worked hard in increasing the value of exports of processed coffee products to Russia. This can improve bilateral relations between the two countries, especially in trade and investment.

The People's Market Has a Strategic Role

The Director General of Domestic Trade, Ministry of Trade, TjahyaWidayanti said that the people's market has a strategic role both economically, socially and culturally. Tjahya conveyed this when visiting Pasar Panorama in Lembang, Bandung, West Java, Saturday (9/2).

According to Tjahya, the people's market has a role to increase local revenue through retribution and regional taxes. While from the socio-cultural aspect, the people's market is a place to interact in society. The price bargaining mechanism that occurs in the people's market is a means of direct communication between sellers and buyers to create familiarity.

Public markets, continued Tjahya, also have a role to absorb labor to reduce unemployment. One more thing, the market plays a role as a price indicator that becomes a reference for the movement in the level of price stability for basic needs and the inflation rate. "So the market is the lifeblood that sustains the economy in the region," he added.

Panorama Market is located in a crowded tourist area, Lembang. Therefore, the Panorama Market can attract tourists, for example by selling superior products in the Lembang area.



Foto: Biro Humas

Minister of Trade: Develop Partnerships and Collaboration In trade

Minister of Trade Enggartiasto Lukita stated the importance of developing the principle of partnership and collaboration in trade activities. Minister Enggar said this when opening a business forum with the theme “Indonesia Sustainable Palm Oil” in New Delhi, India, Thursday (02/21).

This business forum is part of a series of activities to strengthen trade and investment between Indonesia and India. Enggartiasto said, India is the 4th largest trading partner for Indonesia. However, trade relations are actually not only a matter of rank, nor about surplus or deficit but also a matter of partnership. “Trade is a matter of partnership, how we can provide the needs of countries that are our trading partners and how trade can contribute to the development of national and other countries,” he said as conveyed by kemendag.go.id website.

Foto: Biro Humas



The Minister of Trade revealed that palm oil and its derivative products play an important role in the Indonesian economy. About 60 percent of the total value of Indonesia’s exports comes from palm oil. In addition, no less than 16.5 million workers are directly and indirectly dependent on this industry. Indonesia contributes around 50 percent of total world production. Therefore, according to Enggar, Indonesia shares responsibility in maintaining the availability of palm oil, providing labor, and alleviating poverty in the world. “This is important, given the world demand for palm oil is predicted to double to 308 million tons in 2050,” he explained.



Foto: Biro Humas

The Society Is Requested Not Tempted Bid for Illegal PBK Investment

The Head of the Legislative Bureau, Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti/CoFTRA) M. Syist stated, the public needs to be careful of product offerings, investments and business activities in the field of commodity futures trading (PBK) that do not have business licenses from Bappebti.

Syist explained, that product offerings that have the potential to harm the community are still ongoing today. Bappebti has routinely monitored the activities of entities that did not have permission or approval from the Bappebti. These illegal entities usually offer business opportunities or online investments through training, seminars, and education by promising high profits, fixed income, and profit sharing to attract prospective customers. In addition, monitoring is also carried out based on complaints from the public.

“In order to prevent illegal business activities in the PBK field, Bappebti has the authority to require every party to stop business activities that do not have a business permit from Bappebti,” Syist said as reported by kemendag.go.id (2/18).

Syist further explained that business activities as futures brokers can only be carried out by members of the futures exchange in the form of a limited liability company (PT) who obtain a business license as a futures broker from Bappebti. In addition, each party is prohibited from offering futures contracts, sharia derivative contracts, and / or other derivative contracts with or without promotional, recruitment, training, seminars, and / or collecting margin funds, guarantee funds, and / or equivalent for the purpose of transactions relating to futures trading except having permission from Bappebti.

Fajar Wibhiyadi

Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)

Kami Sangat Mendukung Tindakan Hukum Yang Tegas



Foto: Biro Humas

Hari Jum'at merupakan hari informal bagi pegawai PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (KBI). Itu sebabnya Direktur Utama PT KBI (Persero), **Fajar Wibhiyadi**, tampil santai pada setiap Jum'at. Fajar ingin memberi suasana berbeda sejak ia memimpin perusahaan plat merah ini satu setengah tahun lalu. Sarjana hukum Universitas Indonesia (1991) yang juga lulusan Magister Manajemen PPM (2010) dan Magister Hukum (2012) ini juga mengubah sebuah ruangan sebagai *recreation room* dimana para karyawan dapat melepas penat sejenak dengan bermain pingpong, main *game*, berjalan atau berlari di *treadmill*, atau sekedar iseng main bilyar mini. "Saya ingin merespon kebutuhan pegawai KBI yang sekarang ini sebagian merupakan generasi milenial yang memiliki gaya bekerja berbeda dengan generasi sebelumnya," kata Fajar, 51 tahun, di tengah rekan-rekan kerjanya yang masih usia belia.

Dirut PT KBI (Persero) yang gemar berolahraga ini menerima wawancara khusus Buletin Bappebti di ruang kerjanya di lantai 3 Gedung Graha Mandiri di kawasan Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat.

*“Kliring house harus kredibel, kompeten,
termasuk dari permodalan.”*

—FAJAR WIBHIYADI

Buletin Bappebti: *Apa tugas utama PT KBI?*

Fajar Wibhiyadi: Tugas kami hanya tiga, yakni sebagai kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi di industri berjangka (Perdagangan Berjangka Komoditi), Resi Gudang dan Pasar Fisik. Sekarang ini kami lebih banyak menangani kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi di industri berjangka, sekitar 90 persen untuk melakukan kliring dan pejaminan dan penyelesaian menjamin penyelesaian transaksi PBK ini. Sementara sisanya untuk sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Fisik (Pasar Lelang Komoditi).

Buletin Bappebti: *Peran KBI dimana dalam pengelolaan SRG?*

Fajar Wibhiyadi: Dalam hal SRG, peran KBI sebagai Pusat Registrasi yaitu penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, baik meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan seerta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Akan tetapi kami tidak ingin menjadi hanya menjadi Pusreg (Pusat Registrasi). Kami harus berkontribusi untuk masyarakat. Kebetulan KBI merupakan BUMN, maka bersama-sama dengan perbankan dan rekan lainnya kami gaungkan Resi Gudang. Responsnya? Ternyata mereka belum banyak tahu juga mengenai SRG.

Kita sebagai lembaga kliring beroperasi dengan payung hukum yang jelas. Artinya, ada lembaga penjamin yang jelas. Tapi kenapa SRG seperti tidak dilirik. Bank plat merah saja hanya ada satu yang membiayai SRG, bank BPD hanya beberapa. Jadi masih small sekali. Padahal SRG secara potensial dilihat sebagai sesuatu yang sangat mungkin dikembangkan.

Demikian juga dengan Pasar Fisik, masih kecil sekali. Di KBI sendiri untuk penjaminan PLK tidak sampai 2 persen nilainya. Jadi, Pasar Fisik yang

ada belum banyak bergerak. Berbeda halnya dengan PBK yang sudah berjalan dengan baik, apalagi ada transaksi SPA-nya, tinggal sekarang bagaimana kita mengembangkan multilateral-nya. Inilah PR kita bersama, membesarkan multilateral PBK, SRG dan PLK.

Buletin Bappebti: *Kalau di SRG KBI sebagai Pusat Registrasi. Kalau di PBK dimana posisi KBI?*

Fajar Wibhiyadi: Kita sebagai kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi. Ada *buyer* ada *seller*, kami ada di tengah-tengah. Karena pihak *seller* dan *buyer* bisa jadi belum muncul *trust*. Kami-lah yang menjamin bahwa barang yang ditransaksikan akan dikirim dan ditransaksikan sebagaimana mestinya. Jika terjadi sesuatu, maka KBI akan menyelesaikannya, seperti satu kasus dimana kami harus membayar kewajiban kami kepada pihak yang bertransaksi karena adanya masalah yang muncul. (Fajar keberatan menyebutkan pihak yang bermasalah tersebut).

Sebagai Lembaga Kliring, ketika ada masalah maka fungsi KBI akan masuk. Karena itu Lembaga Kliring harus kredibel, kompeten, termasuk dari permodalan. Di Indonesia secara hukum boleh ada Lembaga Kliring lebih dari satu, yakni KBI (PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan ICH (*Indonesia Clearing House*) dan bursa juga ada 2 yakni BBJ/JFX (PT Bursa Berjangka Jakarta/Jakarta Futures Exchange) dan BKDI/ICDX (Bursa Komoditi Derivatif Indonesia/*Indonesia Commodities Derivative Exchange*).

KBI merupakan Persero milik pemerintah. Dalam era kompetisi OK-OK saja terdapat lebih dari satu lembaga yang sama, yang penting *playing field*-nya sama. Nah, masalahnya kadang-kadang level *playing field*-nya tidak sama. Menurut saya kompetisi itu baik. Kalau tidak ada kompetisi



maka layanannya akan begitu-begitu saja, karena orang tidak punya pilihan. Tetapi yang penting kompetisinya *fair*. Karena dengan kompetisi yang berlangsung secara sehat akan memberi manfaat bagi para pelaku-pelakunya.

Buletin Bappebti: *Ada gambaran contohnya tentang fairness itu?*

Fajar Wibhiyadi: Kami mengusulkan kepada Bappebti, kalau disini ada pialang kita *suspend*, maka di bursa sebelah juga semestinya *disuspend*. Kadang terjadi kena *suspend* di KBI, karena satu pialang tidak memenuhi kewajiban atas *payment*. Karena di KBI di-*suspend*, dia coba lompat ke “sebelah” dan ternyata di sebelah dia bisa beroperasi. Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi.

Buletin Bappebti: *Perkembangannya bagaimana saat ini?*

Fajar Wibhiyadi: Kondisinya sekarang lebih baik. Misal, Bappebti memberi peringatan terhadap pialang yang masih belum memenuhi marjin. Saya lihat penindakan hukum sekarang ini lebih baik, misalnya ada pialang yang sudah dicabut izinnya. Kami sangat mendukung tindakan-tindakan tegas seperti itu. Langkah tegas itu harus terus dipertahankan, dan saya yakin para pelaku akan mengikuti aturan yang ditetapkan. Jadi, *law enforcement* mesti ditingkatkan dan dijaga terus.

Buletin Bappebti: *SDM buat mendukung kinerja KBI sendiri bagaimana?*

Fajar Wibhiyadi: Posisi karyawan kami jumlahnya sekitar 60 orang. Alhamdulillah kami bisa menjalankan korporasi ini dengan baik. Teman-teman juga loyal dan memahami tugas dan fungsi mereka. Sekarang ini era sudah berubah era 4.0,



block chain, kripto. Nah, bagaimana teman-teman juga harus sudah mulai mengikuti perkembangan. Mereka harus menguasai masalah. Kepada teman-teman saya tuntut mereka untuk memenuhi level penguasaannya, pengetahuannya, Kalau tidak bagaimana nanti mereka melakukan *risk mitigation* kalau tidak mengerti.

Buletin Bappebti: *Bagaimana meningkatkan mutu SDM itu dilakukan?*

Fajar Wibhiyadi: Banyak cara kita lakukan di KBI. Yang kami lakukan secara *mandatory* (sifatnya wajib) untuk level tertentu belajar S-2 dibiayai oleh kantor.

Buletin Bappebti: *Untuk masyarakat awam, PBK, SRG, PLK kan tidak sepopuler bursa saham. Lalu, bagaimana tingkat kesulitan yang dialami oleh KBI?*

Fajar Wibhiyadi: Saya baru satu tahun setengah di KBI. Dulu saya di bursa saham, tapi posisi saya sebagai broker atau sama dengan pialang di PBK. Jadi saya pelaku dan bukan SRO (*Self-Regulatory Organization*). Saya pikir tadinya ini sama, ternyata *totally different*, konsep marjinya berbeda, *risk appetite*-ya juga sangat tinggi dibandingkan dengan saham. Kalau di saham perbandingannya 1:1, mereka beli dulu baru jual. Kalau di PBK bisa dua sisi, bisa beli dulu baru jual, atau sebaliknya bisa jual dulu baru beli. Marjin di PBK bisa 1:100, risikonya juga besar.



Foto: Biro Humas

Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat kami melakukan literasi. Kami baru saja putar-putar ke cabang-cabang anggota kliring kami di Bandung, Semarang, Medan, Surabaya. Kami melakukan pelatihan, pengarahan kepada para *marketing* di industri ini. Kami sudah kunjungi 36 cabang, target kami tahun ini ada sekitar 180 cabang kami kunjung bersama-sama BBJ (Bursa Berjangka Jakarta).

Dengan kunjungan langsung seperti itu kita bisa sampaikan mengenai risiko, bagaimana mereka harus menggunakan SITNA (Sistem Informasi Transaksi Nasabah), karena kita pelopor sejak 2015 menggunakan SITNA dan lain-lain. Karena ternyata ada juga cabang-cabang yang tidak mengerti apa itu SITNA. SITNA itu sesungguhnya bisa menjadi *tools marketing*.

Buletin Bappebti: *Belakangan ini muncul kripto, bagaimana persiapan KBI menghadapinya?*

Fajar Wibhiyadi: Tentang kripto ini, menurut saya, kalau tidak diatur akan menjadi liar. Saya katakan bahwa ketika ngobrol-ngobrol dengan BI (Bank Indonesia) dan teman-teman lain, saya katakan bahwa kripto harus dikategorikan bukan sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai komoditas. Ini memang tidak mudah. Alhamdulillah Kemendag sudah mengeluarkan peraturan dan juga Bappebti. Saya mendukung semua. Walaupun dari beberapa pelaku masih mencermati dari segi permodalan, misalnya dari segi bursa harus ada permodalan

“Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat kami melakukan literasi. Kami baru saja berkeliling ke Bandung, Semarang, Medan, Surabaya untuk melakukan pelatihan dan pengarahan kepada para marketing di industri PBK.”

—FAJAR WIBHIYADI

Rp1,5 triliun. Aset kripto sangat besar yang juga menuntut Lembaga Kliring yang kredibel termasuk finansialnya.

Buletin Bappebti: *Pemerintah harus tambah modal KBI?*

Fajar Wibhiyadi: Permodalan KBI saat ini sebesar Rp102 miliar, karena berdasarkan ketentuan modal Lembaga Kliring minimal Rp100 miliar. Untuk kripto harus Rp1,5 T. Saat ini tentu KBI tidak bisa. Apalagi dari pemerintah sekarang tidak ada PMN (Penyertaan Modal Negara). Tapi jangan salah, sekarang ini jaman *economic sharing*, ada sudah investor untuk *sharing* modal dan biaya dengan kami. Kami sekarang malah sedang *beauty contest*. Ada beberapa investor yang sudah melakukan pembicaraan, dimana KBI dapat saja tentunya setelah KBI mendapatkan persetujuan dari pemegang saham, kami dapat saja melakukan *joint ownership* dengan investor tersebut.

Rupiah Bergerak di Lever Rp14.000-an



Nilai tukar rupiah kembali bergerak pada level Rp 14.000-an pada akhir Februari. Mengutip *Bloomberg*, rupiah di pasar spot pada perdagangan Rabu (27/2) senilai Rp 14.014 per dolar AS atau melemah 0,16 persen dari posisi sehari sebelumnya senilai Rp 13.992 per dolar AS.

Sebagai gambaran pada awal bulan Februari nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS dan berada di posisi Rp 13.967 per dolar AS pada Jumat (1/2/). Sementara indeks dolar terhadap sejumlah mata uang utama dunia, seperti dikutip *Reuters*, berada pada posisi 96,056 yang merupakan terendah sejak 5 Februari 2019.

Harga Emas Antam Rp 670.000-an

Harga emas batangan bersertifikat milik PT Aneka Tambang (ANTAM) kembali bergerak menurun Selasa (26/2). Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada pada posisi Rp 671.000 per gram. Harga tersebut turun Rp 3.000 dari posisi harga sebelumnya Senin (25/2).

Sementara, harga pembelian kembali atau *buyback* emas Antam juga turun sebesar Rp 3.000 menjadi Rp 596.000 per gram. Berikut harga emas batangan milik Antam dalam pecahan lainnya pada 26 Februari 2019 (sudah termasuk pajak).

Harga emas milik Antam	
pertanggal 1 Februari	pertanggal 26 Februari
0,5 gram: Rp 359.000	0,5 gram: Rp 360.500
1 gram: Rp 670.000	1 gram: Rp 671.000
5 gram: Rp 3.170.000	5 gram: Rp 3.175.000
10 gram: Rp 6.275.000	10 gram: Rp 6.285.000
25 gram: Rp 15.580.000	25 gram: Rp 15.605.000
50 gram: Rp 31.085.000	50 gram: Rp 31.135.000
100 gram: Rp 62.100.000	100 gram: Rp 62.200.000
250 gram: Rp 155.000.000	250 gram: Rp 155.250.000
500 gram: Rp 309.800.000	500 gram: Rp 310.300.000
1000 gram: Rp 619.600.000	1000 gram: Rp 620.600.000

Tren Harga Minyak Dunia Membaik

Pada Kamis (21/2) harga minyak *West Texas Intermediate* (WTI) untuk pengiriman April 2019 di *New York Mercantile Exchange* berada pada level USD 57,23 per barel, naik 0,12 persen jika dibandingkan sehari sebelumnya, Rabu (20/2). Grafik yang membaik ini merupakan tren positif dalam delapan hari berturut-turut, dimana harga minyak mengakumulasi kenaikan sebesar 8,43 persen. Harga minyak yang terakhir ini merupakan level tertinggi sejak 20 November 2018 atau dalam tiga bulan terakhir.



Sementara harga minyak *brent* untuk pengiriman April 2019 di ICE Futures kemarin menguat ke USD 67,08 per barel. Pada Rabu (20/2) harga minyak *brent* naik 0,95 % ketimbang hari sebelumnya. Harga minyak acuan internasional ini pun mencapai level tertinggi sejak 20 November 2018.

Kenaikan harga ini tidak hanya terjadi karena adanya inisiatif pengurangan produksi dari Arab Saudi tetapi juga karena adanya kemajuan negosiasi dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina.

Komoditas dan Indeks Lebih Menarik dari Mata Uang



Prananda Y. Sutopo

Analisis
PT. Phillip Futures

Fenomena perdagangan berjangka pada awal tahun 2019 ini boleh jadi tergambarkan dari pergerakan yang terjadi di PT Phillip Futures. Pada bulan Januari, 3 volume transaksi terbesar adalah produk *MSCI Indonesia Index* berada di urutan pertama dengan jumlah transaksi sebanyak 348 lot, kemudian produk *Mini Crude Oil* di urutan kedua dengan volume transaksi sebesar 88 lot, lalu produk *Crude Oil* di urutan ketiga dengan jumlah volume transaksi sebesar 63 lot. Sedangkan di bulan Februari 2019, produk kakao menjadi produk yang paling diminati dengan volume transaksi mencapai 310 lot, disusul oleh produk *MSCI Indonesia Index* dengan volume transaksi sebesar 200 lot, kemudian produk *Mini Crude* berada di posisi ketiga dengan volume transaksi sebesar 80 lot.

Dari data di atas, terlihat bahwa para nasabah lebih tertarik pada produk komoditas dan indeks dibandingkan produk mata uang. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena banyaknya nasabah yang memanfaatkan perdagangan berjangka sebagai lindung nilai untuk produk komoditas fisik seperti produk kakao. Kedua adalah banyaknya nasabah yang bertransaksi sebagai spekulasi dengan memanfaatkan kondisi ekonomi global.

Berbicara mengenai produk komoditi yang pergerakannya paling menarik di bulan Februari, fokus kita akan tertuju pada produk komoditas yang mempunyai volatilitas yang cukup baik. Dari sektor energi misalnya, produk komoditas minyak mentah dalam hal ini minyak mentah (*Crude Oil*) baik untuk kontrak regular maupun mini di PT. Phillip Futures menjadi produk yang pergerakannya menarik untuk dimanfaatkan. Penguatan harga *crude oil* dari penutupan akhir tahun 2018

hingga bulan Februari 2019 mencapai 28,6 %, dengan persentase pelemahan terbesar di bulan Februari sebesar 8 %. Fluktuasi seperti itu akan memberikan peluang keuntungan yang cukup baik bagi para nasabah dengan memanfaatkan transaksi dua arah. Pergerakan emas juga cukup menarik walaupun pergerakannya terlihat mulai *volatile* di pertengahan bulan Februari.

Produk komoditas lainnya yang juga menarik adalah dari sektor *soft commodities* yaitu kakao yang menjadi produk yang paling banyak ditransaksikan di bulan Februari. Dimana kakao mengalami penguatan sebesar 7,5 % dari akhir bulan Januari dan pelemahan terbesar di bulan Februari sebesar 5,7 %. Naik turunnya harga komoditas inilah yang dimanfaatkan oleh nasabah untuk meraih peluang keuntungan.

Selain dari produk komoditas di atas, produk dari sektor mata uang juga menjadi produk yang pergerakannya menarik di bulan Februari. Hampir semua produk mata uang seperti AUD, GBP, EUR, dan Yen Jepang bergerak sangat *volatile* dengan terpengaruh langsung oleh beberapa faktor fundamental global seperti perang dagang antara Cina dan Amerika.

Perang dagang antara Cina dan Amerika terlihat memberikan dampak terhadap hampir semua sektor di pasar seperti mata uang, metal, indeks, energi, dan *soft commodities*. Sektor yang paling terkena dampaknya adalah pertanian dalam hal ini adalah *soft commodities* dan energi seperti batu bara dan minyak mentah. Diterapkannya tarif pada kedua sektor tersebut oleh Cina membuat harga mengalami fluktuasi yang cukup besar.

Update Jenis Komoditi Perdagangan Berjangka



Indonesia negeri yang sangat kaya dengan berbagai jenis komoditi. Pemerintah juga terus mengembangkan potensi yang luar biasa ini dengan berbagai cara, seperti memperluas jenis-jenis komoditi yang bisa ditransaksikan di bursa Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Dengan makin banyaknya jenis komoditi yang diperdagangkan, maka dampak positifnya tidak hanya bursa menjadi lebih bergairah dengan hadirnya “produk” baru tetapi juga lebih meningkatkan transaksi perdagangan.

I. Untuk komoditi di bidang pertanian dan perkebunan:

1. kopi
2. kelapa sawit dan turunannya
3. karet
4. kakao
5. lada
6. mete
7. cengkeh
8. kacang tanah
9. kedelai
10. jagung
11. kopra
12. teh

II. Untuk komoditi di bidang pertambangan dan energi meliputi:

1. emas
2. timah
3. aluminium
4. bahan bakar minyak
5. gas alam
6. tenaga listrik
7. batu bara

III. Untuk komoditi di bidang industri:

1. gula pasir
2. *plywood*
3. *pulp* dan kertas
4. benang
5. semen
6. pupuk

Untuk itu melalui Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, pemerintah mengatur tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan mulai 4 Februari 2019 ini, jenis-jenis komoditinya adalah sebagai berikut:

IV. Untuk komoditi di bidang perikanan dan kelautan:

1. udang;
2. ikan; dan
3. rumput laut

V. Untuk komoditi di bidang keuangan:

1. mata uang asing;
2. Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia;

VII. Untuk komoditi di bidang aset digital:

1. aset kripto (*crypto asset*)

Dijelaskan pula bahwa semua jenis komoditi tersebut juga dapat dijadikan Subjek Kontrak Derivatif Syariah. Selain itu disebutkan bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek derivatif yang dapat diperdagangkan di luar Bursa Berjangka adalah:

- indeks saham
- indeks emas
- mata uang asing
- saham tunggal asing

Dengan makin beragamnya komoditi yang bisa ditransaksikan di bursa berjangka ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan aktivitas perdagangan berjangka.

Untuk informasi lebih lanjut klik:

http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_zhwpqewx_id.pdf



CARA AMAN BERTRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Sebelum melakukan kegiatan di bidang PBK, Investor perlu memahami tata cara bertransaksi dalam kegiatan PBK serta subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan, menguasai teknis-teknik analisis PBK dan investor memahami informasi perkembangan harga.

JADILAH INVESTOR YANG CERDAS

Investor yang ingin menginvestasikan uangnya dalam Perdagangan Berjangka, sekurang-kurangnya harus mengerti atau memahami dasar-dasar analisis pasar yang dipergunakan untuk memperkirakan pergerakan harga di Bursa Berjangka.



SRG.mobile
Sistem Resi Gudang dalam Genggaman

apa

keuntungan SRG.mobile?



Mudah mengetahui informasi seputar Sistem Resi Gudang, seperti lokasi gudang SRG terdekat, persyaratan memperoleh pembiayaan, perkiraan besar biaya pemanfaatan SRG, informasi harga komoditas.

Memudahkan transaksi Sistem Resi Gudang seperti rencana penyimpanan barang, pengajuan pembiayaan, maupun permintaan pengeluaran barang.

Sarana komunikasi dan konsultasi bagi pengguna aplikasi, pemilik barang, pengelola gudang maupun Badan Pengawas.

Penyebaran pengumuman / informasi baru terkait Sistem Resi Gudang dari BAPPEBTI kepada seluruh pengguna secara cepat dan akurat.

Memudahkan melakukan rencana pemasaran barang dengan mengetahui jadwal pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas.

Download sekarang

